



LKIP **2022**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERINDAG PROVINSI MALUKU**



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha kuasa, atas limpahan kasih dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022, sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan disusunnya LKIP tahun 2022, diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, dan relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan, kritik, dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.



Akhir kata, semoga Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja secara akuntabel.

Ambon, Januari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI MALUKU,

YAHYA KOTTA, S.Pt, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196705271999031004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi organisasi, laporan ini menguraikan sasaran dan permasalahan strategis seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan menjelaskan perencanaan kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dan menyajikan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang meliputi capaian dan akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan sumber daya dan pembelanjaan sesuai dengan rencana kerja secara signifikan dan efektif dalam memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Daerah Maluku.

Laporan kinerja ini memuat capaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada Tahun 2022 yang telah dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu (1) Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku; (2) Meningkatnya Pertumbuhan Industri; (3) Meningkatnya Cakupan Bina Keleompok Pengrajin; (4) Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang; (5) Stabilitasnya Harga Bahan Pokok; (6) Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas; dan (7) Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Secara umum dapat disampaikan bahwa dalam mewujudkan sasaran-sasaran kinerja yang ditargetkan pada Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2022 dapat memperoleh hasil “Sangat Memuaskan”.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku



sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.712.320.002,- dan terealisasi penyerapannya sebesar Rp. 17.268.866.270,- atau sebesar 97,49 %.

Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 3.079.572.000,- dan terealisasi penyerapan sebesar Rp.,- atau sebesar %.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB.I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	2
I.3 Maksud dan Tujuan	11
I.4 Isu Strategis/Masalah yang dihadapi di Tahun 2021	12
I.5 Sistematika Penyajian	13
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	15
II.1 Rencana Strategis	15
II.2 Indikator Kinerja Utama	20
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1 Capaian Kinerja	24
III.2 Capaian Keuangan	69
BAB.IV PENUTUP	73
IV.1 Kesimpulan Pencapaian Kinerja	73
IV.2 Saran	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon II, III, IV.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Per Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai dirinci Menurut Golongan Per Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.5	Penyebaran Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.6	Komposisi Jumlah Pegawai UPTD BAIK Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional.....	9
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai UPTD BAIK dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Per Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.8	Data Jumlah Pegawai UPTD BAIK dirinci Menurut Golongan Per Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.9	Data Penyebaran Pegawai UPTD BAIK.....	10
Tabel 1.10	Data Penyebaran Pegawai UPTD BPSMB.....	11
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai UPTD BPSMB dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Per Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.....	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	23
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	27
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	27
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	28
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	28
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2021.....	29
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	29



Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	30
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri.....	31
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2021.....	32
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	33
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	33
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.....	34
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang.....	36
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	36
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Resntra.....	36
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang.....	37
Tabel 3.17	Capaian Sasaran Stabilitasnya Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2021.....	37
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	37
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	38
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Stabilitasnya Harga Kebutuhan Pokok.....	38
Tabel 3.21	Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2021.....	44
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021	45
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	46
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas.....	52
Tabel 3.25	Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2021.....	54
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	54



Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	54
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.....	55
Tabel 3.29 Penyerapan Anggaran per Program/Kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	57
Tabel 3.30 Penyerapan Anggaran per Program/Kegiatan APBN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	60
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam LKIP yang disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja tahun 2022.

LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu komitmen untuk senantiasa besungguh-sungguh mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*” .

I.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Adapun penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok yaitu; **Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi Dan Tugas Dekonsentrasi Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.**

2. Fungsi

Fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. Merumuskan program di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Merumuskan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas pembantuan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. Menetapkan pedoman tata cara pemberian ijin dan pelaksanaan layanan umum bidang perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;



- g. Membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas dinas kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan tata usaha dinas;
- i. Membina dan memberi petunjuk/arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan serta menilai prestasi kerja serta bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik;
- k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui sekretaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Struktur Organisasi

Kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya struktur organisasi yang terbaru pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017. Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terdiri dari beberapa unsur yaitu: 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 2 Kepala Bidang, 2 Kepala UPTD, 10 Seksi/Jabatan Fungsional, 3 Sub Bagian, 33 Staf atau fungsional umum, dan 1 Fungsional tertentu.

Selanjutnya dijelaskan secara khusus, tugas pokok sesuai struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:



1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Gubernur Maluku dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program. Bagian Kesekretariatan terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. **Kepala Bidang Industri**, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di bidang industri. Bidang ini terdiri atas
 - a. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - b. Kepala Seksi Industri Agro
4. **Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Bidang ini terdiri;
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
 - b. Kepala Seksi Tertib Niaga
5. **Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri**, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri. Bidang ini terdiri atas;
 - a. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran
 - b. Kepala Seksi Sarana Perdagangan
6. **Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri**, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di bidang perdagangan luar negeri. Bidang ini terdiri atas;
 - a. Kepala Seksi Fasilitas Ekspor Hasil Industri dan Non Industri
 - b. Kepala Seksi Fasilitas Impor dan Kerjasama Luar Negeri

7. **UPTD BAIK (Balai Aneka Industri Dan Kerajinan)**, Dalam rangka teknis operasional pembinaan perindustrian dan perdagangan diperlukan lembaga khusus, yang terdiri dari
 - a. Kepala Balai
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Layanan dan Bina Usaha IKM
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. **BPSMB (Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang)** Dalam rangka teknis operasional pembinaan perindustrian dan perdagangan diperlukan lembaga khusus, yang terdiri dari
 - a. Kepala Balai
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Layanan, Pengujian Dan Sertifikasi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2022

No.	JABATAN	UNSUR/ORANG	%
1.	Kepala Dinas	1	1,96
2.	Sekretaris	-	0
3.	Kepala Bidang	2	3,92
4.	Kepala Sub Bagian	3	5,8
5.	Kepala Seksi/Fungsional Penyetaraan	10	19,6
6.	Kepala UPTD	2	3,92
7.	Fungsional Umum	32	62,7
8.	Fungsional Tertentu	1	1,96
JUMLAH :		51	100

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku hingga 31 Desember 2022 didukung oleh potensi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 51 orang. Secara singkat dapat dikemukakan jumlah Pejabat Struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan 2 UPTD adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon II, III, IV

NO	JABATAN	JUMLAH	ESELON	KET.
1	Kepala Dinas	1	II	
2	Sekretaris	-	III	
3	Kepala Bidang	2	III	
4	Kepala UPTD	2	III	
5	Kepala Sub Bagian	3	IV	
6	Kepala Seksi/Jabatan Fungsional	10	IV	

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku per 31 Desember 2022 menurut pangkat/golongan, laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan
Per Jenis Kelamin

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SMP	1	-	1
SMU/Sederajat	4	3	7
Diploma 4	1	-	1
Sarjana	14	17	31
Pasca Sarjana (S2)	4	7	11
Jumlah	24	27	51

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 orang dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang. Hal ini membuktikan bahwa ada kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan pendidikan terendah adalah SMP kemudian pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) mendominasi maksimal tingkat pendidikan di dalam Dinas kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2).

Tabel 1.4
Data Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Golongan
Per Jenis Kelamin

PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pembina Tk.I (IV/b)	2	1	3
Pembina (IV/a)	-	3	3
Penata Tk.I (III/d)	8	11	19
Penata (III/c)	3	3	6
Penata Muda Tk.I (III/b)	6	6	12
Penata Muda (III/a)	2	3	5
Pengatur Tk.I (II/d)	1	-	1
Pengatur (II/c)	1	-	1
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	-	1
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
JUMLAH	24	27	51

Tabel 1.5
Penyebaran Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Pada Bagian Sekretariat, dan Bidang
Berdasarkan Jenis Kelamin

SEKRETARIAT/BIDANG/SUBAG/SEKSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KADIS	1	-	1
<i>SEKRETARIAT</i>			
Sekretaris	-	-	-



Kasubag Kepeg & Umum	-	1	1
Fungsional Umum	9	4	13
Fungsional Tertentu	-	2	2
BIDANG INDUSTRI			
Kepala Bidang	-	-	-
Fungsional Tertentu	1	1	2
Fungsional Umum	2	2	4
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA			
Kepala Bidang	-	1	1
Fungsional Tertentu	1	1	2
Fungsional Umum	1	2	3
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
Kepala Bidang	1	-	1
Fungsional Tertentu	1	1	2
Fungsional Umum	3	1	4
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI			
Kepala Bidang	-	-	-
Fungsional Tertentu	-	2	2
Fungsional Umum	2	-	2
J U M L A H	22	18	40

UPTD Balai Aneka Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Jumlah pegawai UPTD Balai Aneka Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, menurut pangkat/golongan laki-laki maupun perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6

Komposisi Jumlah Pegawai UPTD BAIK Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH	ESELON	KET.
1	Kepala UPTD	1	III	
2	Kasubag TU	1	IV	
3	Seksi Layanan Dan Bimbingan Usaha Ikm	1	IV	
4	Fungsional Penyuluh	1	-	



Perindag			
----------	--	--	--

Tabel 1.7

**Jumlah Pegawai UPTD BAIK Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan
Per Jenis Kelamin**

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SMP	-	-	-
SMU/SEDERAJAT	-	1	1
Sarjana Muda	-	-	-
Sarjana (S1)	1	3	4
Pasca Sarjana (S2)	1	1	2
Jumlah	2	5	7

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai UPTD BAIK, laki-laki sebanyak 2 orang dan pegawai UPTD BAIK perempuan sebanyak 4 orang. Hal ini membuktikan bahwa ada kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan pendidikan terendah adalah SMU kemudian Pegawai dengan tingkat Sarjana (S1) mendominasi maksimal tingkat pendidikan di UPTD BAIK diikuti oleh tingkat Pasca Sarjana (S2).

Tabel 1.8

**Data Jumlah Pegawai UPTD BAIK Dirinci Menurut Golongan Per Jenis
Kelamin**

Pangkat Golongan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina (IV/A)	1	2	3
Penata Tk.I (III/D)	-	2	2
Penata (III/C)	-	-	-
Penata Muda (III/B)	1	1	2
Jumlah	2	5	7

Tabel 1.9

Data Penyebaran Pegawai UPTD BAIK

SUB BAGIAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kepala UPTD	-	1	1
Sub Bagian Tata Usaha	1	2	3
Seksi Layanan Dan Bimbingan Usaha Ikm	1	1	2
Penyuluh Perindag	-	1	1



Jumlah	2	5	7
--------	---	---	---

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Jumlah pegawai UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, menurut pangkat/golongan laki-laki maupun perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10
Data Penyebaran Pegawai UPTD BPSMB

SUB BAGIAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kepala UPTD	-	1	1
Sub Bagian Tata Usaha	-	2	2
Kepala Seksi Layanan Pengujian dan Sertifikasi	-	1	1
Staf	-	-	-
Jumlah	-	4	4

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai UPTD BPSMB Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Per Jenis Kelamin

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SMP	-	-	-
SMU/SEDERAJAT	-	-	-
Sarjana Muda	-	-	-
Sarjana (S1)	-	4	4
Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
Jumlah	-	4	4

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai UPTD BPSMB, semuanya perempuan sebanyak 4 orang, dengan Tingkat Pendidikan Sarjana (S1).



I.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan, serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipergunakan untuk memberikan informasi tentang berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis.

Maksud disampaikan laporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai maupun yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur.

Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai sasaran aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 memiliki tujuan, yaitu:

1. Sebagai sarana bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2022 kepada Gubernur Maluku;
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

I.4. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi di Tahun 2022

Isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketrampilan aparatur pembina dan pelaku usaha
2. Sistem kelembagaan dan manajemen industri belum optimal
3. Kurangnya modal usaha
4. Masih kurangnya peralatan industri modern
5. Kurangnya pendampingan terhadap IKM
6. Kurangnya kemitraan usaha yang dibangun untuk penguatan IKM
7. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi IKM
8. Fasilitasi dan layanan ekspor yang masih terbatas

9. Diversifikasi produk ekspor masih terbatas
10. Komoditi ekspor masih lebih mengandalkan sektor perikanan
11. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi
12. Belum optimalnya jaringan distribusi, sistem logistik dan rantai pasok yang efektif dan efisien secara menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota dan gugus pulau
13. Masih kurangnya kerjasama perdagangan antara Kabupaten/Kota
14. Tenaga kerja yang berkurang akibat dampak Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kurangnya nilai produksi
15. Masih terbatasnya sarana perdagangan pasar dan gudang
16. Masih kurangnya edukasi terkait perlindungan konsumen dan tertib niaga
17. Pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu barang masih terbatas
18. Lemahnya sarana laboratorium pengujian

I.5. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini memuat penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, maksud dan tujuan, isu strategis atau permasalahan yang dihadapi, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022.



BAB II Perencanaan Kinerja.

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada Bab ini dijelaskan tentang pencapaian realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022, analisis dan evaluasi capaian kinerja dari program kegiatan serta realisasi anggarannya, dan pengungkapan prestasi yang diraih.

BAB IV Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan umum atas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dan langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022.
- Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dan dilakukan sejalan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan.

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut menjadi pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional serta dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

II.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan strategi atau arah serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada untuk melakukan proyeksi kondisi masa yang akan datang, dengan demikian perencanaan strategis dapat menjadi suatu petunjuk yang digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja ke masa yang akan datang.

Arah perencanaan pembangunan memanfaatkan potensi wilayah disesuaikan dengan potensi sumber daya alam pada masing-masing gugus pulau. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terhadap

kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Maluku berbasis gugus pulau yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun sarana perdagangan dalam rangka mendukung swasembada pangan serta mendorong investasi, produksi dan pemasaran berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan oleh industri-industri pengolahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berfungsi sebagai Alat dan Tolak Ukur pembangunan sektor industri dan perdagangan serta merupakan komitmen bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dengan semua pihak terkait untuk menyelenggarakan program pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selama periode 2019–2024, terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Periode 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Visi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, yang merupakan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yaitu:

**“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan
Kepulauan ”**

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna:

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna:

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

B. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi diatas, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku periode tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

C. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas maka harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dalam jangka waktu lima tahun dan menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan sebagai kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program

dan aktivitas organisasi dalam pencapaian misi yang relevan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Misi Pertama
 - Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
 - Meningkatkan Kerjasama antar pemerintahan.
2. Tujuan Misi Ketiga
 - Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah,
 - Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
 - Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah,
 - Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan,
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas, lembaga teknis daerah dan masyarakat.
3. Tujuan Misi Kelima
 - Peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan local,
 - Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha,
 - Meningkatkan ekonomi daerah.
4. Tujuan Misi Keenam
 - Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Sasaran

Sasaran-sasaran prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yaitu:

1. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan program prioritas yaitu perluasan kesempatan bekerja, sedangkan kegiatan prioritasnya adalah penciptaan wirausaha baru.
2. Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan, dengan program prioritas yaitu:

-Peningkatan produksi Perkebunan dan kehutanan, dan kegiatan prioritasnya adalah:

1. Pengembangan Pala, Cengkeh dan Kelapa.
2. Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan kehutanan.

-Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan kegiatan prioritas program prioritas ini adalah:

1. Peningkatan Daya saing produk IKM
2. Pameran Produk dan pemasaran.

3. Peningkatan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya yang Mendukung Aktivitas Ekonomi, Investasi dan Pariwisata.

Program prioritas pada kegiatan ini adalah penciptaan iklim investasi dan usaha kecil menengah dan kondusif. Kegiatan prioritasnya adalah pengendalian inflasi daerah.

E. Strategi

Strategis dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi. Strategi pengembangan sektor industri dan perdagangan dengan meliputi :

- Meningkatkan daya saing industri daerah berbasis teknologi komoditi unggulan. Mengembangkan industri berbasis kluster dan kawasan.
- Memperbaiki sistem logistik daerah dan meningkatkan volume/kapasitas ekspor daerah. Peningkatan akses masyarakat ke pusat pemasaran
- Mengawasi dan menjaga arus distribusi bahan kebutuhan pokok di daerah. Menyediakan data informasi stok dan biaya produksi di sentra produksi.
- Menyediakan sarana pasar dan Gudang

F. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan sektor industri dan perdagangan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan pada yang dilakukan secara periodik sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahun. Adapun arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan industri berbasis komoditi unggulan
2. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien Penguatan pasar domestik akses pasar
3. Pengembangan ekspor dan volume ekspor komoditas unggulan daerah Peningkatan penelitian, inovasi, riset dan pengembangan Produk Unggulan
4. Perencanaan dan pengembangan kawasan industri daerah
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis
6. Menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan
7. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
8. Magang dan Uji Coba Produk dan Fasilitasi Produk Pelaksanaan pameran unggulan daerah
9. Tersedianya layanan pengujian terhadap komoditi ekspor

II.2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan fungsi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan. Adapun target Indikator

Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana, serta sistem administrasi dan pelaporan	Untuk mengetahui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan sistem administrasi yang tepat waktu	(Jumlah target peningkatan aparatur, sarana prasarana dan sistem administrasi/ Jumlah aparatur, sarana prasarana, dan sistem administrasi tepat waktu) x 100%	100%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri	Untuk mengetahui jumlah pertumbuhan industri	(Jumlah target industri yang dibina/Jumlah industri rata-rata) x 100%	0,65%
3	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Untuk mengetahui peningkatan jumlah kelompok pengrajin yang dibina	(Jumlah target kelompok pengrajin yang dibina/Jumlah kelompok pengrajin) x 100%	68,50%
4	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Untuk mengetahui peningkatan jumlah kelompok pedagang yang dibina	(Jumlah target kelompok pedagang yang dibina/Jumlah kelompok pedagang) x 100%	9,09%
5	Stabilnya Harga Bahan Pokok	Presentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok	Untuk mengetahui ketersediaan jumlah bahan pokok	(Jumlah ketersediaan bahan pokok/Jumlah kebutuhan) x 100%	3,5 - 4%
6	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	Untuk mengetahui peningkatan nilai ekspor non migas	(Jumlah nilai ekspor/Jumlah estimasi target ekspor) x 100%	15,7
7	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Barang Beredar yang sesuai dengan ketentuan	Untuk mengetahui jumlah barang barang beredar sesuai ketentuan	(Jumlah target barang yang diawasi/Jumlah estimasi barang) x 100%	75%

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka

intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Tahun 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana, serta sistem administrasi dan pelaporan	100%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri	0,65%
3	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	68,50%
4	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang	9,09%
5	Stabilnya Harga Bahan Pokok	Presentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok	3,5 - 4%
6	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	15,7
7	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Barang Beredar yang sesuai dengan ketentuan	75%

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK), dari pelaksanaan program kegiatan sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai metode perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dengan menggerakkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan sifatnya terukur, memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan metode pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai metode perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left\{ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	>91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC
6.	>30-50	Kurang	C
7.	0-30	Sangat Kurang	D

III.1. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selama Tahun 2022, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024 serta perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selama Tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) sasaran kinerja dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Capaian setiap sasaran

kinerja beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel-tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

**** SASARAN 1 : Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku**

Analisis pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana, serta sistem administrasi dan pelaporan	100%	98,9%	98,9%

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1 Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana, serta sistem administrasi dan pelaporan	100%	96%	100%	98,9%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2021 dan 2022 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana, serta sistem administrasi dan pelaporan	96%	98,9%	100%

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	APBD / APBN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	4.426.506.157	4.378.881.245	98,9	APBD
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.079.230.115	1.075.954.000	99,7	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.950.000	32.950.000	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	638.523.130	638.391.297	99,9	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.685.000	134.635.000	99,9	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.292.293.182	1.267.443.501	98,1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.076.576.000	1.071.111.870	99,5	

**** SASARAN 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase Pertumbuhan Industri	0,65 %	1,67 %	256,9 %

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa target 0,65% adalah target pertumbuhan industri yaitu sebanyak 74 Industri Kecil Menengah (IKM) pada setiap tahun dari 11.312 IKM yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 1,05% atau pertumbuhan Industri sebesar 190 IKM pada tahun 2022, dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 256,9% Hal ini dipicu oleh meningkatnya jumlah bantuan peralatan industri yaitu sebanyak 184 IKM.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022		
	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Presentase Pertumbuhan Industri	1,38%	212 %	1,67 %	256,9 %

Tabel 3.6 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dan 2022. Pada Indikator Pertumbuhan Industri realisasi kinerja meningkat sebesar 0,31% dan Capaian Kinerja mencapai 47,7%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata realisasi kinerja dan capaian kinerja Bidang Industri meningkat.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2021 dan 2022 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Presentase Pertumbuhan Industri	1,38 %	1,67 %	0,65 %

Tabel 3.7 menunjukkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 & 2022 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja tahun 2024, maka perlu meningkatkan capaian kinerja melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan meningkatkan jumlah bantuan peralatan kepada IKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Industri dan cakupan bina terhadap kelompok pengrajin. Dari realisasi tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.

Selain itu diharapkan bantuan peralatan yang diberikan kepada masyarakat/pelaku IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan di Bidang Industri dapat dialokasikan secara tepat sasaran sehingga IKM yang ada mampu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi daerah di situasi pasca pandemi covid 19, dan tetap bertahan dalam situasi ini meskipun harus berhadapan dengan banyak tantangan baik dengan jumlah tenaga kerja yang minim, peralatan produksi yang masih sederhana maupun tingkat pemasaran produksi yang masih rendah.

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dilaksanakan oleh salah satu bidang teknis yaitu Bidang Industri dan satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Aneka Industri dan Kerajinan (UPDT BAIK) yang juga mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan Meningkatnya Pertumbuhan Industri. Sehingga pada tabel-tabel berikut akan ditampilkan sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dalam 1 (satu) tabel, maka capaian kerjanya digabung dan dijumlahkan untuk diperoleh rata-rata hasil pembagiannya.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Industri.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	APBD / APBN
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.546.432.000	3.542.897.500	99,9	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	796.894.000	794.447.500	99,6	APBD
	Koordinas, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.749.538.000	2.748.450.000	99,9	APBD
2	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka	1.856.000.000	1.820.640.000	98,1	APBN
	Adm Kegiatan	211.430.000	211.430.000	100	APBN
	Bimbingan Teknis Pertanggung jawaban adm keuangan untuk PPSPM	13.654.000	13.654.000	100	APBN
	Penyusunan Lap Kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi	72.289.000	72.289.000	100	APBN
	Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Bidang Keuangan	9.212.000	9.212.000	100	APBN
	Pemanfaatan Bagan Akun Standar dan Sistem Penganggaran dalam Aplikasi SAKTI	19.156.000	17.616.000	92	APBN
	Bimtek Penyusunan Laporan Semester II Tahun 2021 dan Laporan Semester I Tahun 2022	20.948.000	19.928.000	95	APBN
	Forum Koordinasi Penyelesaian Aset BMN	9.268.000	9.268.000	100	APBN
	Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran	24.408.000	24.408.000	100	APBN



Koordinasi Ke Kementerian	22.160.000	22.160.000	100	APBN
Penyelenggaraan Rakornas T.A. 2023 di Maluku	661.200.000	661.200.000	100	APBN
Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan RAKORNAS di Maluku	36.404.000	36.296.000	99	APBN
Bimtek Proses Produksi Pangan Lokal dan Diversifikasi Produk di Kota Ambon	68.993.000	68.993.000	100	APBN
Bimtek Pengenalan HKI Aneka Makanan dan Minuman dari Pangan Lokal di Kab. Maluku Tengah	93.637.000	93.637.000	100	APBN
Bimbingan Teknis Proses Produksi Anyaman Bambu di Kota Tual	97.837.000	97.837.000	100	APBN
Bimbingan Teknis Proses Produksi Pangan Lokal menjadi Aneka Makanan dan Minuman di Kab. MBD	100.837.000	100.837.000	100	APBN
Bimbingan Teknis Perbengkelan Otomotif di Kab. Buru	91.837.000	91.837.000	100	APBN
Pembinaan dan Pengembangan OVOP Tenun di Kab.KKT dan Jus Buah Pala di Kab. SBT	123.810.000	94.099.000	76	APBN
Pengembangan UPL	97.080.000	94.099.000	97	APBN
Layanan Kantor	81.840.000	81.840.000	100	APBN

Dari Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan penunjang sasaran baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun 2022 diatas, dapat dilihat capaian realisasi anggaran untuk APBD adalah sebesar 95,7% dan anggaran APBN sebesar 98,1%. Hal Ini membuktikan bahwa capaian kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan karena capaian keuangan yang tinggi.

**** SASARAN 3 : Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9**Capaian Sasaran Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	68,50 %	96,95 %	141,53 %

Dari Tabel 3.9 diatas dilihat bahwa Realisasi Kinerja Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin telah mencapai 96,95% meskipun Maluku dan Indonesia secara umum masih berada pada situasi pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19, namun melalui bantuan peralatan industri kepada pengrajin IKM sebanyak 184 unit, maka dapat meningkatkan presentasi Cakupan Bina kelompok Pengrajin melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Tabel 3.10**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1 Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	99,10 %	168,3 %	96,95 %	141,53 %

Tabel 3.10 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dan 2022. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja yaitu sebesar

26,77%, hal ini diakibatkan pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penerima bantuan peralatan industri.

Tabel 3.11

**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2021 dan 2022 Serta Tahun Akhir Periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	99,10 %	96,95 %	115,77 %

Tabel 3.11 menunjukkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 & 2022 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja tahun 2024, maka perlu meningkatkan capaian kinerja melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan cakupan bina kelompok pengrajin. Dari realisasi tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi tolok ukur untuk capaian target di tahun 2024. Sangat diharapkan realisasinya nanti dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebagai bentuk kontribusi sektor industri terhadap visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang terjabarkan melalui Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.

Tabel 3.12

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	APBD / APBN
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.580.000.000	5.192.043.800	93	APBD



Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.140.000.000	1.131.603.000	99,2	APBD
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Industri	425.000.000	421.375.000	99,1	APBD
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.015.000.000	3.639.065.800	90,6	APBD

Dari Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan penunjang sasaran diatas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran untuk APBD adalah 93%. Ini menjelaskan bahwa capaian kinerja telah maksimal yang dibuktikan dengan realisasi keuangan yang tinggi.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Industri dan Cakupan Bina kelompok pengrajin sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan terhadap program dan kegiatan penunjang sasaran antara lain:

1. Melakukan Identifikasi terhadap potensi dan sentra produksi serta updating data IKM sehingga dapat diperoleh Data IKM yang akurat.
2. Monitoring IKM secara rutin untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh IKM.
3. Memfasilitasi IKM dalam hal perijinan sehingga produk IKM yang dihasilkan sesuai dengan standard dan dapat dipasarkan ke gerai modern.
4. Melakukan promosi dan pameran sehingga Produk IKM semakin dikenal bukan hanya di Maluku tapi juga di daerah lain, melalui kerjasama dan intervensi dari Pemerintah dan BUMN/BUMD.

5. Melakukan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pendampingan terhadap pelaku IKM serta memberikan Bantuan peralatan, Bantuan kemasan, agar sumber daya IKM dan Produk serta kemasan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga dapat bersaing dengan yang lain.
6. Ekspor merupakan langkah akhir yang harus menjadi sasaran terhadap pelaku IKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah
7. Tersedianya Rumah kemasan di Kota Ambon diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh Pelaku IKM serta dapat menekan biaya produksi. Oleh karena itu Sumber daya manusia yang berkompentensi serta Kebijakan Pemerintah dalam mengurangi biaya Kemasan melalui Perda yang ditetapkan bagi Pelaku IKM dan umum sangat penting mengingat sebagian besar Pelaku IKM di Maluku masih berskala rumah tangga.
8. Dengan adanya Dekranasda Provinsi Maluku dan Kab/kota, Pasar Oleh-Oleh dan Outlet yang ditempatkan di Bandara Pattimura menjadi ajang promosi terhadap produk IKM dan dapat menampung Produk yang dihasilkan oleh Pelaku IKM yang telah sesuai dengan standar
9. Adanya sinkronisasi Program dan kegiatan APBD dan APBN sehingga tidak tumpang tindih dalam pencapaian sasaran kinerja Bidang Industri.

**** SASARAN 4 : Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pedagang**

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pedagang pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang
Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang	9,09%	9,09%	100%

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4
antara Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja
1.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang	7,2%	100%	9,09%	100%

Tabel 3.14 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dan 2022. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 100%, yang dipengaruhi oleh peningkatan Sarana Perdagangan yang diserahkan kepada pedagang.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang	7,2%	9,09%	9,09%

Tabel 3.15 menunjukkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 & 2022 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja tahun 2024, maka perlu meningkatkan capaian kinerja melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang. Dari realisasi tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini dapat menjadi tolok ukur untuk capaian target di tahun 2024. Sangat diharapkan realisasinya nanti dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebagai bentuk kontribusi sektor industri terhadap visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang terjabarkan melalui Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pedagang.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatkan Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	APBD/ APBN
1.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	575.000.000	573.500.000	99,7	APBD
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	575.000.000	573.500.000	99,7	APBD
T O T A L		575.000.000	573.500.000	99,7	APBD

**** SASARAN 5 : Stabilnya Harga Bahan Pokok**

Hasil Pengukuran Sasaran Stabilnya Harga Kebutuhan Pokok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Stabilnya Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok	3,5 – 4 %	7,73%	193,2%

Pada tahun 2022 ekonomi dunia yang mengalami krisis sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, kondisi cuaca ekstrim di daerah-daerah sentra produksi, kenaikan harga bahan bakar minyak secara global, merupakan faktor pemicu kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yaitu : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Cabe, Bawang Merah, Tepung Terigu, daging sapi serta telur ayam boiler, mengakibatkan terjadi inflasi. Pada bulan Desember 2022 laju inflasi Maluku tercatat sebesar 6,39% yoy diatas rata-rata Nasional dan diatas target TPID

Provinsi Maluku. Target kinerja sebesar 3,4 - 4%, realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 7,73% atau diatas target, padahal seharusnya stabil di angka 3,4 - 4% atau dibawah target.

Tabel 3.18**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja
1.	Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok	3,8	99,6%	7,73%	193,2%

Tabel 3.18 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dan 2022. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka pada tahun 2022 capaian kinerja menurun dibandingkan tahun 2021 yang stabil di angka 3,8%, sedangkan tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 7,73% .

Tabel 3.19**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok	3,8%	7,73%	3,5 - 4%

Tabel 3.19 menunjukkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 & 2022 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja tahun 2024, maka perlu meningkatkan capaian kinerja melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga inflasi terkendali di angka 3,5-4%. Hal ini dapat menjadi tolok ukur untuk capaian target di tahun 2024. Sangat diharapkan realisasinya nanti dapat terjaga di angka 3,5-4% atau dibawah angka 3,5-4%.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran Persentase Fluktuasi harga Kebutuhan Pokok, sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Stabilitasnya Harga Kebutuhan Pokok

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	APBD/ APBN
1.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.668.182.000	2.667.262.000	99,6	APBD
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.668.182.000	2.667.262.000	99,9	APBD
	Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Maluku	961.512.000	957.900.700	99,6	APBN

Untuk tahun 2022 ini alokasi dana APBD dari Pemerintah Provinsi Maluku pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah sebesar Rp. 2.668.182.000,- (Dua milyar enam ratus enam puluh delapan



juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 2.667.262.000,- (Dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,6%. Sedangkan alokasi dana APBN melalui program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Maluku sebesar Rp. 961.512.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 957.900.700,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) atau terealisasi sebesar 99,6%.

Berikut hasil pelaksanaan kegiatan bidang PDN pada tahun 2022 dapat kami uraikan sebagai berikut :

A. Program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berdasarkan DPA Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka berikut disampaikan rincian kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pasar Murah Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Kegiatan pasar murah menjelang HBKN tahun 2022 di Provinsi Maluku dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1) Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Pelaksanaan kegiatan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022, dibuka pada tanggal 20 April 2022 oleh Gubernur Maluku, **Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail**, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 s/d 23 April 2022 bertempat di Lapangan Merdeka Ambon bersamaan dengan penyerahan paket Bantuan Peduli Maluku sebanyak 9.000 paket. Pasar murah Idul Fitri kali ini penjualan secara mobile ke lokasi-lokasi yang mayoritas masyarakat muslim, dilakukan selama 3 hari mulai pembukaan sampai hari terakhir. Berikut lokasi pasar murah mobile :



1. Kamis, 21 April 2022 WaWakasih, Larike, Asilulu, Ureng, Hari I
Seith dan Negeri Lima, Kecamatan
Leihitu dan Leihitu Barat

Laha, Dusun Kemiri, Dusun Taeno,
Hunuth Bawah, Waiheru dan latta,
Kecamatan Baguala dan Teluk
Ambon
2. Jumat, 22 April 2022 Pandan Kasturi, Lorong Pandan, Hari II
Depan SMPN 14 Kebun Cengkeh,
Gunung Malintang dan Air Besar
Batumerah Kecamatan Sirimau

Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitu
Messing, Hila, Kaitetu Wakal,
Kecamatan Leihitu
3. Sabtu, 23 April 2022 Liang, Tulehu, Tenga Tenga Tial Hari III
Kecamatan Salahutu

Ponogoro, Pohon Mangga, Waihaong,
Silale, Jalan Baru, Kecamatan
Nusaniwe dan Sirimua

Distributor yang terlibat dalam kegiatan pasar murah yakni CV. Gema Rejeki, serta Ambon Farmers Market juga ikut berpartisipasi. Komoditi yang dijual pada pasar murah ini terdiri dari, paket senilai Rp.130.000,- yang dijual dengan harga murah Rp.50.000,- per paket, yang terdiri atas Telur ayam broiler sebanyak 1 rak, tepung terigu sebanyak 2 kg, gula pasir sebanyak 2 kg, Minyak goreng sebanyak 1 liter.

Hasil dari kegiatan pasar murah ini banyak masyarakat yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan barang pokok terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang terdata dalam data PKH Dinas Sosial Provinsi Maluku yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

2) Menjelang Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Kegiatan pasar murah menjelang Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni mulai tanggal 12 – 14

Desember 2022, pembukaannya bertempat di Pelataran Halaman Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Pembukaan kegiatan pasar murah ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Denny Lilipory. Kegiatan ini dilakukan secara mobile ke desa-desa yang masyarakatnya akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Sama halnya dengan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, kegiatan pasar murah mobile juga dilakukan selama 3 (tiga) hari ke desa-desa sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| 1. Senin, 12
Desember
2022 | Alang, liliboi, Hatu dan Dusun Riang,
Kecamatan Leihitu Barat dan Teluk Ambon

Benteng Karang, Lembah Argo, Lateri
Tanah Misi dan Lata Kecamatan Baguala | Hari I |
| 2. Selasa, 13
Desember
2022 | Hatiwe Besar, Wayame, rumah Tiga,
Hunuth dan Pabrik Tahu Mardika
Kecamatan Teluk Ambon dan Sirimau

Halong, Ahuru, Batu Gajah dan Karang
Tagepe, Kecamatan Sirimau, dan
Nusaniwe | Hari II |
| 3. Rabu, 14
Desember
2022 | Waa, Suli Kampung, Suli Tial dan Suli
Banda Kecamatan Salahutu

Seri, Waimahu, Tupa, Ukuhury, Omputy
Kecamatan Nusaniwe | Hari III |

Sama halnya dengan pasar murah sebelumnya (menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H), kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang akan merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Begitu pula dengan distributor yang terlibat dan kuota komoditi yang dijual serta harganya sama dengan kedua pasar murah sebelumnya.

Hasil dari kegiatan ini banyak masyarakat yang terbantu terutama mereka yang akan merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal

ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam membeli barang kebutuhan pokok yang dijual oleh distributor. Selain itu harga beberapa komoditi seperti telur ayam broiler di pasar tradisional yang sebelumnya tinggi dapat terkendali.





2. Rapat Koordinasi Daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022, bertempat di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, **Bapak Ir. Sadali Ie, M.Si**. Narasumber untuk kegiatan ini berasal dari Kementerian Perdagangan R.I yakni Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen PDN Kemendag dan Ketua TGPP Provinsi Maluku. Peserta yang mengahdiri kegiatan ini berasal dari Bupati / Walikota se- Provinsi Maluku, OPD dan instansi terkait, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Ketua Satgas Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kepala Bulog Kanwil Maluku dan Malut, Kepala KSOP Ambon, Kepala ASDP Cabang Ambon, Pertamina Cabang Ambon, PT. PLN Cabang Ambon, PT. Pelindo dan operator pelayaran (PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Tempuran Mas Line dan PT. Spil), dan pelaku usaha/distributor, ritel modern serta wartawan.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penetrasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok menjelang Hari Natal 2022 dan Tahun 2023, menekan laju inflasi di Provinsi Maluku dan menjaga serta mengontrol daya beli masyarakat.

Kegiatan rapat koordinasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yakni menjelang Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

3. Koordinasi ke Sentra Produksi

Kegiatan Koordinasi ke Sentra Produksi Barang Kebutuhan Pokok sebanyak 1 (satu) kali dilaksanakan di 2 (dua) daerah Sentra yakni:

1) Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Koordinasi ke Sentra Produksi barang kebutuhan pokok di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 26-29 April 2022, di 4 (empat) lokasi yakni perusahaan pelayaran PT. Tanto Intim Line, PT. Pelindo IV Cabang Makassar, PT. Eastern Pearl Flour Mills dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Dari koordinasi yang dilakukan dengan bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Ashari Fakhshirie Radjamilo, M.Si didampingi Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri bapak Idham M. Betta, SE, M.M diketahui bahwa komoditi bahan pokok yang dikirim ke Provinsi Maluku dilakukan melalui pelabuhan Makassar yang dikelola oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar. Setiap minggunya ada 8 – 12 trip kapal pelayaran ekspedisi disamping kapal pelayaran penumpang PELNI dan kapal rakyat yang memasok bahan kebutuhan pokok dan barang penting ke Maluku yang datanya selalu tercatat di Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Makassar maupun di PT. Pelindo IV (Tbk) Cabang Makassar dan sewaktu-waktu jika diperlukan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dapat meminta data tersebut dari stake holder terkait. Lebih lanjut juga dikemukakan oleh bapak Idham selaku penanggungjawab data pengangkutan, bahwa bahan kebutuhan pokok yang dimuat ke pelabuhan-pelabuhan Maluku didominasi oleh komoditas beras, gula, telur, minyak goreng, ayam beku, kacang-kacangan, bawang merah, cabe dan tepung terigu, yang merupakan unggulan daerah terutama beras dikarenakan status provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu



sentra beras nasional. Juga berbagai barang penting seperti semen, aspal, besi, bahan bangunan lainnya. Sementara untuk pantauan harga Provinsi Sulawesi Selatan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pada 7 (tujuh) pasar pantauan, dilakukan secara rutin pada setiap hari kerja. Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memiliki aplikasi pantauan pasar berbasis web pada laman <https://datacenter-perdagangan.sulseprov.go.id/> yang memang masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi sudah dapat diakses secara bebas oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah serta stake holder terkait yang membutuhkan data perdagangan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk produksi Bawang merah di sentra Enrekang, di akhir bulan April ini sudah selesai panen, dan memasuki masa penjemuran, sehingga harga akan sedikit lebih tinggi, yang disebabkan karena kualitas Bawang merah akan lebih baik dan besar dari Bawang awal panen yang berbuah kecil. Komoditas Beras sangat aman dengan surplus sebesar 2 juta ton dengan ketahanan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Stok ini pernah dipasok ke pulau Jawa, khususnya ke Pasar beras Cipinang di Jakarta, dan juga sempat dieksport ke luar negeri sebanyak 50.000 ton. Stok beras di Provinsi Sulawesi Selatan ini menjamin ketersediaan di Indonesia Timur dan khususnya juga bagi Provinsi Maluku. Di antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku telah terjalin kerjasama dagang, dimana secara berkala dilaksanakan Temu Bisnis dan Misi Dagang, baik dari Sulawesi Selatan ke Maluku, maupun dari Maluku ke Sulawesi Selatan. Temu bisnis terakhir adalah Maluku Baileo Exhibition 2022 di Makassar. Sementara itu menurut Kepala Dinas Perdagangan, dalam bulan Juni 2022, direncanakan akan dilaksanakan kunjungan balasan berupa Misi Dagang di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh pengusaha asal Sulawesi Selatan.

Kegiatan koordinasi dengan Staf Pemasaran PT. Tanto Intim Line Makassar, Pak Roy, diperoleh penjelasan bahwa pelayaran kapal peti



kemas ke Provinsi Maluku setiap minggu 1 – 2 kali ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan 1 kali seminggu ke pelabuhan Tual. Biaya kontainer ukuran 20 *feet* adalah sebesar Rp. 9.000.000,- *port to port* (ptp) untuk bahan pokok biasa, sedangkan untuk bahan pokok yang mudah busuk (seperti bawang, telur) yang memerlukan kontainer terbuka / *open door container* biayanya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- ptp. Jangka waktu perjalanan dari pelabuhan Makassar ke Maluku (Ambon dan Tual) berkisar rata-rata 3 hari dalam cuaca normal. Kapal yang melayari wilayah Indonesia Timur adalah kapal berukuran total 500 *Teus* dari pelabuhan Surabaya atau pelabuhan Jakarta. Menjelang Hari raya Idul Fitri tahun 2022 ini, sudah ada 1 (satu) kapal yang tiba dan sandar di Ambon, yaitu Kapal Tanto Selalu pada tanggal 28 April 2022 yang membawa barang kebutuhan pokok dan barang penting sebelum libur di Pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo yang dimulai tanggal 1 – 3 Mei 2022. Tanggal 4 Mei Kapal Tanto Siap keluar dari pelabuhan Makassar dan estimasi tiba pada 7 Mei 2022. Selanjutnya Kapal Tanto Surya yang direncanakan tiba di Ambon pada 12 Mei 2022, sehingga pihak PT. Tanto Intim Line Makassar berani menjamin bahwa pada HBKN Idul Fitri tahun 2022 dan setelahnya, tidak akan terjadi kekurangan pasokan barang kebutuhan pokok di Maluku, karena pengamanan jalur distribusi menjadi prioritas utama perusahaan pelayaran. Terkait kekurangan kontainer beberapa bulan lalu di Ambon, terjadi akibat tidak seimbang nya perputaran bongkaran dengan Surabaya yang kurang, dimana kapal yang berasal dari Surabaya, saat sandar di Makassar, bongkarannya memakan waktu yang lebih lama, sehingga akibatnya pasokan juga terlambat datang ke Ambon. Tetapi hal ini telah diperbaiki dengan mengadakan kontainer dari pelabuhan lain untuk menyokong permintaan dari Jalur Makassar ke Ambon.

Kegiatan koordinasi dengan PT. Pelindo Makassar diketahui bahwa setiap minggu, ada kapal pengangkut bahan pokok dan barang

penting yang melayari rute pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon maupun pelabuhan Tual melalui kapal peti kemas sekurang-kurangnya 2 kapal dan kapal pelayaran penumpang PT. PELNI yang transit lebih dulu di pelabuhan Bau Bau. Sehingga frekuensi muatan sedikitnya 16 (enam belas) kali dalam sebulan dengan menggunakan kapal PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line dan PT. TEMAS line, PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) serta kapal Pelni Dorolonda, Dobonsolo, Tidar dan Nggapulu.

Menurut Staf Pemasaran PT. Pelindo IV (Tbk) Cabang Makassar, Pak Taju biaya pemuatan kontainer barang kebutuhan pokok dari Pelabuhan Makassar sampai ke Pelabuhan Ambon *Port to Port* secara Total adalah sebesar Rp. 16.000.000,- sudah termasuk biaya pelabuhan, kontainer perusahaan pelayaran (kisaran 9-10 juta), freight, dan pengurusan dokumen.

Kegiatan pengiriman barang kebutuhan pokok masyarakat dari pelabuhan Makassar ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan pelabuhan Tual dilakukan sedikitnya 16 kali dengan menggunakan kapal ekspedisi dan kapal PELNI dan menggunakan kapal-kapal kayu tetapi dalam jumlah yang kecil. Jarak tempuh kapal dari pelabuhan Makassar ke Ambon selama 24 jam dan Tual selama 48 jam untuk kapal penumpang milik PT. PELNI, dan 3 – 4 hari bagi kapal kontainer. Barang kebutuhan pokok yang dimuat ke pelabuhan-pelabuhan Maluku didominasi oleh komoditas beras, gula, telur, minyak goreng, ayam beku, kacang-kacangan dan tepung terigu dan berbagai barang penting seperti semen, aspal, besi, bahan bangunan lainnya.

Pada saat kunjungan ke Pabrik PT. Eastern Pearl Flour Mills yang merupakan anak perusahaan dari PT. Interflour Group yang memproduksi tepung terigu, bertemu dengan jajaran Direksi dan manajer PT. Eastern Pearl Flour Mills yakni Ibu Christiany Hopemi Situru (Senior Vice President), bapak Henry Andreas Lasut (Senior



Manager HR dan GA) bapak Budhi Sjamsul (Plant Controller Manager) dan bapak Zakat Manda (Logistic and Shipping Manager) diketahui bahwa di Kota Makassar terdapat 2 (dua) pabrik penggilingan terigu yang letaknya saling berhadapan di Jalan Hatta Makassar. Pangsa Pasar perusahaan ini di Indonesia menempati urutan kedua setelah PT. Bogasari. Menurut ibu Christy, pabrik beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan bahan baku didatangkan dari luar negeri dengan skala produksi sebanyak 700.000 ton per tahun. Hasil produksi, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terkhusus di Indonesia bagian timur, juga diekspor keluar negeri yakni Filipina dan Brunei. Produk tepung terigu yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari terigu berprotein rendah, sedang maupun tinggi, dengan berbagai merk dagang yaitu merk Kompas, Gunung, Gerbang, Gatokaca, Serdadu, Teko, Dua Pedang, K2, serta White Bear. Pangsa pasar terbesar produksi perusahaan ini di Maluku adalah tepung terigu merk Kompas.

Masih menurut ibu Christy dan pak Manda, dalam tahun 2022 ini, akibat perang antara Rusia dan Ukraina, yang merupakan pemasok Gandum terbesar dunia, harga gandum dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang akhirnya mendorong kenaikan harga Tepung Terigu yang mana bahan baku utamanya adalah Gandum. Akibat perang juga menjadikan perusahaan asuransi tidak mengcover pengiriman dari Rusia dan Ukraina, sehingga terjadi persaingan harga untuk memperoleh pasokan Gandum dari negara lain. Disamping itu juga perang menjadikan harga minyak dunia naik signifikan sehingga solar untuk pengangkutan dan produksi menjadi naik. Hal-hal ini terjadi merupakan kejadian luar biasa yang terjadi diluar kontrol dan estimasi perusahaan sehingga mau tidak mau untuk menyelamatkan operasional produksi perusahaan harus terjadi kenaikan terhadap harga jual produk yaitu Tepung Terigu. Akan tetapi menurut pak Budhi, kenaikan harga jual Tepung Terigu tidak signifikan, hanya



berkisar Rp.1.000,- per kg Tepung terigu. Pak Manda kemudian menambahkan bahwa perusahaan berusaha untuk tetap memproduksi secara efisien. Walaupun ongkos freight kapal telah naik 3 (tiga) kali sejak September 2021, untuk Provinsi Maluku, telah dikirimkan pada Januari 2022 sebanyak 42 kontainer Terigu per bulan. Sampai pertengahan April 2022, sudah dikirimkan 30 kontainer lebih guna mengamankan stok Terigu di Provinsi Maluku pada bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah tahun 2022. Pihak perusahaan sebenarnya dapat mengirimkan pasokan lebih banyak ke Maluku, tetapi berhubung *space* di kapal yang terbatas sehingga pasokan masih dirasa kurang. Apalagi untuk daerah seperti pelabuhan Namlea di Pulau Buru yang hanya dilayari oleh kapal penumpang PT. Pelni dan Tol Laut, pasokan belum bisa memenuhi permintaan dari distributor disana. Permasalahan Tol Laut yang terbatas dengan hanya 30 – 40 kontainer per kapal menjadikan perusahaan harus bersaing dengan pelaku usaha lokal untuk mendapatkan *space* kapal Tol laut untuk mengirimkan Tepung Terigu ke wilayah-wilayah terpencil. Disamping itu kendala muatan balik dari Timur ke Barat juga menghambat penambahan armada kapal dan titik-titik tujuan Tol Laut. Untuk Kota Tual perusahaan memasok 20 – 30 kontainer per bulan. Sehingga untuk provinsi Maluku secara keseluruhan, PT. Eastern Pearl Flour Mills setiap bulannya dapat memasok 60 – 70 kontainer Tepung Terigu berbagai merek baik dalam kemasan 1 kg, 0,5 kg dan kemasan curah (bantal). Untuk pengangkutan dengan kapal PT. TEMAS, Tbk secara langsung atau *direct* dari pelabuhan Makassar ke Ambon, sementara kapal perusahaan pelayaran yang lain yakni SPIL, Tanto dan Merataus adalah kapal yang berasal dari pelabuhan Surabaya. Sejak awal tahun 2022, khusus untuk perusahaan pelayaran PT. Tanto, mengalami kekurangan ketersediaan kontainer.

Dalam kunjungan ke sentra distribusi bahan pokok di Kota Makassar ini juga, diketahui bahwa selama tahun 2021 sampai pada triwulan I

tahun 2022, kegiatan muat antar pulau dari pelabuhan Makassar ke Maluku khususnya Ambon dan Tual, berjalan dengan lancar dengan rata-rata tonase per bulannya mencapai 19.550 ton. Beberapa jenis bahan pokok yang dikirimkan ke provinsi Maluku, berasal dari distributor bahan pokok di provinsi Sulawesi Selatan diantaranya minyak goreng, mentega, beras, terigu, gula, susu, mie instan dan barang campuran. Para distributor ini secara rutin mengirimkan barang kebutuhan pokok ke berbagai wilayah Provinsi Maluku lewat jalur pelayaran. Harga barang kebutuhan pokok yang dipantau oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga terpantau stabil.

Dari data perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh informasi bahwa rata-rata disparitas harga barang kebutuhan pokok dengan harga rata-rata di Provinsi Maluku mencapai 23,6% (dua puluh tiga koma enam persen).

Setiap konteiner barang yang dikirimkan dari Makassar ke Ambon dan Tual dikenakan biaya pemuatan kontainer barang kebutuhan pokok dari Pelabuhan Makassar sampai ke Pelabuhan Ambon Port to Port secara Total adalah sebesar Rp. 16.000.000,- sudah termasuk biaya pelabuhan, kontainer perusahaan pelayaran (kisaran 9-10 juta), freight, dan pengurusan dokumen per konteiner.

2) Provinsi Jawa Timur

Dari kegiatan koordinasi dan pemantapan kelancaran distribusi Bapok di Provinsi Jawa Timur menjelang Idul Fitri 2022, dapat kami laporkan bahwa :

1. Koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan stakeholder lain :

Tim Koordinasi Pemantapan Distribusi Bapok yang dipimpin Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku,

diterima langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan beberapa OPD terkait (dinas Pertanian, dinas ketahanan pangan, dll) . Pada prinsipnya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan OPD terkait sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjaga kelancaran dan ketersediaan barang pokok di Maluku. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diwakili kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan bahwa stok barang kebutuhan pokok di Jawa Timur saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan, sehingga stok tersebut dipastikan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Maluku. Khusus untuk harga, ada beberapa komoditi yang memang mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 seperti cabe, telur,dll. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mendukung Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya menyediakan barang kebutuhan pokok ke Maluku.

2. Koordinasi dengan OPD Lingkup Kabupaten Probolinggo

Pada pertemuan dengan beberapa dinas di Kabupaten Probolinggo seperti Dinas perindag dan dinas Pertanian dilakukan di pasar Bawang Probolinggo, tim memperoleh informasi bahwa stok bawang saat ini belum terlalu banyak sehingga harga jga masih sedikit tinggi, meskipun dibanding beberapa bulan lalu, harga sudah mengalami penurunan dari Rp. 28.000,- s/d Rp. 30.000,-/kg menjadi Rp. 24.000,-/kg. Sementara harga normal di tingkat pedagang besar (pasar bawang Probolinggo) adalah sebesar Rp. 20.000,- per kg.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu pedagang bawang merah

yang biasanya mengirimkan bawang ke Maluku, saat ini stok bawang belum dapat didistribusi ke Maluku karena harganya yang dinilai masih tinggi dan tidak dapat bersaing dengan harga bawang merah dari Engrekan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Koordinasi PT. Kebon Agung (Produsen Gula Pasir)

Tim melakukan kunjungan ke PT. Kebon Agung, salah satu produsen gula pasir di Jawa Timur yang paling banyak memasok gula di Maluku, dan diterima langsung oleh Direktur Utama dan beberapa direktur (keuangan, operasional) dan beberapa staf.

Pada kesempatan pertemuan tersebut, Bapak Plt. kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku menyampaikan kondisi gula pasir di Provinsi Maluku yang terus bergerak naik. Selain itu pula masyarakat Maluku lebih senang mengonsumsi gula produksi PT. Kebon Agung karena rasanya yang manis. Plt. Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Provinsi Maluku belum memiliki Distributor 1 (D1). Distributor di Maluku adalah D2 dan tentu akan panjang rantasi distribusi, sehingga harga gula juga tentu akan tinggi.

4. Pimpinan PT. Kebon Agung pada prinsipnya tetap siap untuk membantu pendistribusian gula ke Maluku, seberapa banyak kebutuhan masyarakat di Maluku dengan harga yang akan disampaikan. Menurut pihak PT. Kebon Agung, kondisi harga yang bergerak naik karena memang kondisi kurangnya stok gula akibat belum panen. Namun demikian, pada bulan Mei 2022. Selain itu pimpinan PT. Kebon Agung juga memberi ruang agar apabila Distributor 2 (D2) di Maluku yang mau membeli gula, dapat memesan langsung ke Pihak PT. Kebon Agung sebanyak yang dibutuhkan. Pimpinan PT. Kebon Agung juga menyampaikan terima kasih karena selama ini hubungan kerja antara pihak PT. Kebon Agung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Maluku berjalan dengan baik.

4. Operasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi

Kegiatan operasi pasar dilaksanakan mulai dari tanggal 03 November sampai dengan 30 Desember 2022, yang berlangsung di 93 titik lokasi.

Pembukaannya bertempat di Pelataran Halaman Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Pembukaan kegiatan pasar murah ini dilaksanakan pada tanggal 03 November 2022 oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, bapak Drs. Hadi Basalama, M.Si. Kegiatan ini dilakukan secara stay di Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah dan secara mobile ke desa-desa di Pulau Ambon. Kegiatan operasi pasar mobile juga dilakukan ke desa-desa sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Kecamatan
Leihitu Barat | Desa Alang, liliboi, Hatu, Wakasihu dan
Larike |
| 2. | Kecamatan Leihitu | Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitu Messing,
Wakal, Hilla, Kaitetu, Seiyh, Negeri Lima,
Ureng Asilulu, Pasar Teohoku, Telaga
Kodok |
| 3. | Kecamatan Salahutu | Waai, Tulehu, Suli |
| 4. | Kecamatan Teluk
Ambon | Laha, Tawiri, Dusun Riang, Hatiwe Besar,
Wayame, Kelurahan Tihu, Rumah Tiga,
Hunuth. |



5. Kecamatan Baguala Waiheru, BTN Passo Indah, Pasar Transit Passo, Dusun Benteng Karang, Batu Gong.
6. Kecamatan Sirimau Batu Gajah, BTN Kebun Cengkeh, Lorong Pandan, Gadihu Ahuru, Galunggung, Kebun Cengkeh depan SMPN 14, BTN Kanawa, Wara Air kuning, Kahena.
7. Kecamatan Nusaniwe Dusun Seri, Latuhalat, Airlouw, Amahusu, Pohon Mangga, OSM, Waihaong, Kelurahan Benteng.

Kegiatan ini berhasil menekan laju inflasi Provinsi Maluku dari 1,13 % mtm pada bulan November menjadi hanya 0,56% mtm pada bulan Desember 2022, walaupun secara total dari Januari sampai Desember 2022 inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 6,39 % yoy diatas rata-rata Nasional dan diatas target TPID Provinsi Maluku.

Hasil dari kegiatan ini juga banyak masyarakat yang terbantu terutama mereka yang akan merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam membeli barang kebutuhan pokok yang dijual oleh distributor. Selain itu harga beberapa komoditi seperti telur ayam broiler di pasar tradisional yang sebelumnya tinggi dapat terkendali.

5. Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting perasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Target Fluktuasi harga bapok ditetapkan sebesar 3,5 - 4% dengan realisasi sebesar 7,73%. Realisasi ini berada diatas target perkiraan yakni 3,5 – 4%. Penyebab terlampauinya target adalah akibat belum berakhirnya pandemi Covid – 19, Perubahan cuaca yang ekstrem dan tak menentu, Perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dunia sepanjang tahun 2022 ini, kenaikan harga BBM dan kekhawatiran terjadinya resesi secara global. Barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi kenaikan harga dari Januari-

Desember 2022 ini adalah Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Cabe (Rawit, Keriting dan Terompong), Bawang merah, Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau, Sayuran hijau, Sayuran dataran tinggi, Tepung terigu, Daging sapi dan ayam serta Telur ayam broiler. Penyebab kenaikan harga Minyak goreng, Kedelai dan Tepung terigu adalah akibat krisis global yang dipicu oleh Perang Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga daging dan telur ayam broiler disebabkan oleh kenaikan harga pakan ternak, sementara untuk Bawang merah, sayuran dan Cabe lebih banyak disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrem dan curah hujan tinggi yang memicu gagal panen.

Berdasarkan Rekapitulasi rata-rata pantauan harga barang kebutuhan pokok masyarakat sepanjang Tahun 2022 yakni bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022, terdapat 15 (lima belas) Komoditas yang mengalami fluktuasi Kenaikan Harga yakni Beras kualitas Medium dan Premium, Gula kristal putih, Minyak goreng, Daging Sapi, Daging ayam broiler, Terigu, Telur ayam broiler, Kedelai impor, Cabe, Bawang, Kacang-kacangan, Tomat, Sayur dataran tinggi dan Sayuran hijau. Serta 2 (dua) yang mengalami fluktuasi penurunan harga yakni Beras Ketan dan Sayur Kacang Panjang. Sementara untuk Komoditas lainnya seperti Minyak goreng curah/Minyakita, Daging ayam kampung, Telur ayam kampung, Susu, Jagung, Garam, Ikan kembung, Ikan Teri kering dan Ketela pohon, masih dalam kisaran yang stabil dan tidak befluktuasi. Berikut disajikan secara grafis dan analisis penyebab fluktuasi tersebut.









Selain Monitoring Stok dan Harga secara rutin di pasar tradisional dan gerai modern, juga dilaksanakan kegiatan sidak yang dilakukan oleh tim Satgas Pangan Terpadu Provinsi Maluku yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Bulog Divre Maluku, Balai POM Maluku, Balai Karantina Pertanian dan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Katahanan Pangan.

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, dan mencegah penimbunan barang kebutuhan pokok yang berfluktuasi serta koordinasi untuk kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2022. Seperti diketahui bahwa menjelang HBKN rata-rata harga dan stok barang kebutuhan pokok sering berfluktuasi yang berdampak masyarakat.





**** SASARAN 6 : Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas**

Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dalam urusan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	15,7	40,5	257,9%

Berdasarkan tabel 3.21 dilihat dari realisasi Nilai Ekspor Maluku Non Migas adalah sebesar US\$ 40,5 Juta maka ada kenaikan sebesar 157,96% dari target sebesar US\$ 15,7 Juta. Peningkatan ekspor ini disebabkan adanya kenaikan ekspor komoditi Udang oleh PT. Wahana Lestari Investama yang mengalami kenaikan signifikan pada bulan Mei 2022 dan juga Kebijakan Pemerintah Daerah untuk ekspor dari pelabuhan ekspor Maluku dan adanya eksportir baru komoditi perikanan. Kenaikan ini juga disebabkan kinerja Tim Peningkatan Ekspor (TIPE) dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 263.a Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan menerapkan pelayanan dengan Sistem Aplikasi untuk pengurusan perizinan melalui Early Information Sistem (EIS), Non Stop Service 24 Jam 7 Hari (NSS 247) dan One Stop Service (OSS). Ekspor langsung dari Maluku sudah dilaksanakan sejak bulan Pebruari Tahun 2018.

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas dan Capaian Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian nilai ekspor non migas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 6
Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	16,3	113,9%	40,5	257,9%

Berdasarkan tabel 3.22 diatas Realisasi Nilai Ekspor Maluku Non Migas Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar USD 24,2 Juta atau meningkat sebesar 144%.

Berikut ini perbandingan realisasi indikator Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra Tahun 2024.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6
Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Akhir Tahun Periode Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	16,3	40,5	10%

Berdasarkan tabel 3.23 maka sampai dengan akhir periode Renstra yaitu Tahun 2024 target Nilai Ekspor Non Migas adalah 10% dari Nilai Ekspor Non Migas tahun sebelumnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas maka pada Tahun Anggaran 2022 Bidang Perdagangan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan untuk meningkatkan Nilai Ekspor Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Identifikasi Komoditi potensial ekspor di Maluku Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, desa wootay komoditi potensial ekspor, pendataan terhadap eksportir atau UKM potensial ekspor UKM Wootay.



Output yang dicapai dari kegiatan Identifikasi Komoditi potensial ekspor adalah munculnya pelaku ekspor baru sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

2. Koordinasi Peningkatan Ekspor

Koordinasi Peningkatan Ekspor dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Seram Utara, Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual.

Output yang dicapai dari kegiatan Koordinasi Peningkatan Ekspor Identifikasi adalah umunsulnya komoditi ekspor baru ntuk mendapatkan komoditi ekspor sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

3. Monitoring Pelaksanaan Ekspor Langsung

Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan monitoring sebanyak (delapan) kali yaitu ekspor langsung Ikan Tuna loin di Pelabuhan Yos Sudarso yang diekspor oleh PT. Harta Samudera, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Maluku Prima Sukses, PT. Peduli Laut Maluku. Sedangkan di bandara



B. Program Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan kegiatannya adalah :

1. Pelatihan Ekspor

Pelatihan ekspor diikuti oleh aparat Bidang Perdagangan Luar Negeri dan

eksportir yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang ekspor.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan ekspor kepada aparat dan eksportir sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

2. Pameran TEI 2022

Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di ikuti oleh 2 (dua) UKM yaitu UKM Mie Sehat Cempaka dan UKM G&R Masohi dengan produk Abon Tuna. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpromosinya komoditi ekspor maluku sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 maka Realisasi Anggaran program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini :

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)			
1.	Program Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	237.678.000	234.498.000	98,6
-	Fasilitasi dan Pembinaan Daerah Terkait Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	20.518.000	20.518.000	100
-	Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi kepada UMKM melalui Pameran TEI	83.896.000	83.896.000	100
-	Layanan Perkantoran	133.264.000	130.084.000	97,6
B.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			



2.	Pengembangan Ekspor	324.124.000	323.695.000	99,8
-	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagag Lokal Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	324.124.000	323.695.000	99,8

Nilai Ekspor Non Migas Maluku pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkat dan semakin meminimalisasi permasalahan yang dihadapi eksportir dengan cara:

- a. Perlu dilakukan negosiasi dan komunikasi intensif dengan perusahaan penerbangan untuk dapat memperluas atau membuka penerbangan untuk negara tujuan ekspor lainnya.
- b. Mendorong Pemerintah daerah atau swasta harus dapat menyediakan laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi
- c. Perlu adanya intervensi Pemerintah Pusat untuk membantu para eksportir dengan memberikan subsidi untuk membantu para pelaku ekspor mengatasi tingginya harga kontainer.
- d. Melakukan koordinasi ditingkat daerah maupun pusat
- e. Sinkronisasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama yang terkait dengan regulasi sehingga dapat mengikat semua perusahaan yang beroperasi di Maluku
- f. Pemerintah daerah khususnya instansi terkait secara proaktif mendorong dan memberikan kemudahan kepada eksportir untuk melakukan ekspor langsung dari Maluku serta membuat regulasi yang dapat membatasi barang/komoditi ekspor yang keluar dari Maluku tanpa membuat dokumen Ekspor di Maluku.
- g. Perlu adanya diversifikasi produk ekspor agar tidak bertumpu hanya pada produk perikanan.

**** SASARAN 7 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dilaksanakan oleh salah satu bidang teknis yaitu Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Selain itu juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku ini terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPDT BPSMB) yang juga mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sehingga pada tabel-tabel berikut akan ditampilkan sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dalam 1 (satu) tabel, maka capaian kinerjanya digabung dan dijumlahkan untuk diperoleh rata-rata hasil pembagiannya.

Adapun analisis pengukuran pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.25**Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2021**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Barang Beredar yang sesuai ketentuan	75 %	79,88%	106,5%

Capaian 2022 :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}}{\text{sesuai dengan ketentuan perundang – undangan}} \times 100 \\ & \frac{\text{jumlah barang beredar yang diawasi}}{\text{sesuai dengan ketentuan perundang – undangan}} \times 100 \\ & = \frac{258}{323} \times 100\% = 79,88\% \end{aligned}$$

Capaian :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Barang Beredar yang Diawasi} \\ & = \frac{\text{yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tahun 2022}}{\text{Persentase target daerah tahun 2022}} \times 100 \\ & = \frac{79,88}{75} \times 100\% = 106,51\% \end{aligned}$$

Tabel 3.26**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1 Persentase Barang Beredar yang sesuai ketentuan	70,5	108,5%	79,88	106,5

Tabel 3.27**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1 Persentase Barang Beredar yang sesuai ketentuan	70,5%	79,88%	100% = 200 jenis produk

Jenis Barang Beredar yang diawasi diklasifikasikan sebagai berikut :

- Barang Wajib Label dalam Bahasa Indonesia
- Barang Wajib Manual (Petunjuk Penggunaan) dan Kartu Garansi (Kartu Jaminan Purna Jual) dalam Bahasa Indonesia
- Produk Wajib SNI
- Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang Wajib Didaftarkan

Pada tahun 2022, jumlah barang beredar yang diawasi berjumlah 323 barang, yang terdiri dari berbagai tipe dari jenis barang beredar yang diawasi.

Sedangkan dari jumlah barang beredar yang diawasi tersebut, yang sesuai dengan ketentuan secara kasat mata berjumlah 258 barang.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 7.

Tabel 3.28

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 7
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

No.	Program		Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		351.564.000	APBD
	1.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Kabupaten/Kota	87.904.000	
		1) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	87.904.000	
	1.2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Kabupaten Kota	263.660.000	
		1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	263.660.000	
2	Perlindungan Konsumen di Daerah		372.311.000	APBN
	1.1	Edukasi Konsumen	207.810.000	
		1) Penyelenggaraan Hari Perlindungan Konsumen	115.000.000	
		- Pembuatan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul dalam Rangka Harkonas	15.000.000	
		- Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) Tahun 2022	100.000.000	
		2) Sosialisasi Perlindungan Konsumen (Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah)	92.810.000	
	1.2	Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen	164.501.000	
		1) Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Barang Beredar dan Jasa	111.893.000	
		- Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Barang Beredar dan Jasa	82.743.000	



		-	Pembelian Sampel Kotak Kontak	8.100.000	
		-	Pengiriman Sampel	3.800.000	
		-	Pengujian Sampel Kotak Kontak	17.250.000	
	5)		Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	52.608.000	

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahun akan datang, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, antara lain :

1. Penambahan SDM Petugas Pengawas, baik Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen / Perdagangan (PPNS-PK/DAG), baik melalui cara rekrutmen CPNS/PPPK maupun mengikutkan SDM yang telah ada untuk pelatihan PPBJ, PPTN dan/atau PPNS-PK/DAG.
2. Pada saat pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan barang beredar dan/atau jasa, pengawasan kegiatan perdagangan, maupun penyidikan, sebaiknya petugas yang ditugaskan adalah petugas yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang pengawasan (PPBJ, PPTN, dan/atau PPNS-PK/DAG). Hal ini agar sesuai dengan amanat pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2108 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
3. Diperlukan penambahan anggaran, khususnya APBD terkait pengawasan barang beredar, dimana diperlukan pembelian sampel barang hingga pengujiannya, sehingga hasil pengawasan dapat lebih maksimal. Selain itu, dengan adanya hasil pengujian barang, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terkait barang beredar yang berdasarkan hasil pengujiannya tidak sesuai dengan parameter yang ditetapkan.
4. Selain penambahan anggaran untuk pembelian dan pengujian sampel, diperlukan juga penambahan anggaran agar kegiatan pengawasan dapat dilakukan hingga ke tingkat kecamatan pada kabupaten/kota, bukan hanya di

ibukota kabupaten/kota saja.

5. Pengadaan kendaraan operasional untuk kegiatan pengawasan, baik pengawasan barang beredar dan/atau jasa, pengawasan kegiatan perdagangan, maupun penyidikan sehingga mobilisasi petugas pengawas dapat lebih maksimal.
6. Perlu dibuka formasi jabatan Penguji Mutu Barang pada penerimaan pegawai Provinsi Maluku, dikarenakan UPTD BPSMB Maluku belum memiliki ASN sebagai tenaga fungsional Penguji Mutu Barang.

III.2. Capaian Keuangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku per 31 Desember 2022 telah melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.29

**Penyerapan Anggaran Per Program/Kegiatan APBD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Tahun 2022**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	4.426.506.157	4.378.881.245	98,9
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.079.230.115	1.075.954.000	99,6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.950.000	32.950.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.771.860	796.786.874	98,2
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.685.000	134.685.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.292.293.182	2.267.443.501	98,1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.076.576.000	1.071.111.870	99,5
2	Program Perizinan dan	68.230.000	68.122.000	99,8



Pendaftaran Perusahaan				
	Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	68.230.000	68.122.000	99,8
	Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	68.230.000	68.122.000	99,8
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.243.182.000	3.241.722.000	99,9
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.243.182.000	3.241.722.000	99,9
	Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	3.243.182.000	3.241.722.000	99,9
4	Program Pengembangan Ekspor	324.124.000	323.695.000	99,8
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	324.124.000	323.695.000	99,8
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	324.124.000	323.695.000	99,8
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	466.944.000	464.764.800	99,5
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Kabupaten/Kota	466.944.000	464.764.800	99,5
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh	87.904.000	87.834.000	99,9



	Kabupaten Kota			
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Kabupaten/Kota	115.380.000	113.634.000	98,4
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	263.660.000	263.276.800	99,8
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.183.333.925	8.791.681.225	95,7
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.936.894.000	1.926.050.500	99,4
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembaruan Sumber Daya Industri	3.231.439.925	3.226.564.925	99,8
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	4.015.000.000	3.639.065.800	90,6
	Jumlah	17.712.320.082	17.268.866.270	97,5

Sedangkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Tahun 2022 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.30
Penyerapan Anggaran Per Program/Kegiatan APBN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
A	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Maluku	961.512.000	957.900.700	99,6
B	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	237.678.000	234.498.000	98,6



C	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka	1.856.000.000	1.836.387.000	99,8
	Jumlah	3.055.190.000	3.028.785.700	99,1

BAB IV**P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis sebagai upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance*.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran kinerja menunjukkan nilai yang cukup berhasil karena mencapai 95 % sampai 100 %, bahkan terdapat capaian indikator kinerja yang melebihi 100 %. Hal tersebut karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur, masyarakat dan stakeholder terkait.

IV.1. Kesimpulan Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran capaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1**Capaian Sasaran Kinerja****Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022**

No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori Nilai
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	99,9	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	256,9	Sangat Memuaskan



3	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	141,5	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	100	Sangat Memuaskan
5	Stabilnya Harga Bahan Pokok	193,25	Tidak Memuaskan
6	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	257,9	Sangat Memuaskan
7	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	106,5	Sangat Memuaskan
Rata-rata Capaian Kinerja		165,13	Sangat Memuaskan

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, maka secara umum kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2022 hasilnya adalah “**Sangat Memuaskan**”.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp.17.712.320.082,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.268.866.270,- atau sebesar 97,5 %.

Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 3.055.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.028.785.700,- atau sebesar 99,1 %.

IV.2. Saran

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, maka perkenankanlah kami memberikan masukan dan saran sebagai berikut:



1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dukungan anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memfasilitasi Pengrajin IKM melalui bantuan peralatan maupun infrastruktur yang memadai, karena sebagian besar anggaran pemberdayaan IKM merupakan hasil pokok pikiran DPRD sehingga dalam menentukan penerima bantuan tidak tepat sasaran.
2. Terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggarannya, walaupun sebagian besar merupakan pokok pikiran DPRD. Harapan kami untuk kedepannya kegiatan prioritas Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wakil Gubernur Maluku tersebut dapat diperhatikan.